

KONSTITUSI NEGARA INDONESIA

(Pelaksanaan UUD 1945 dan Amandemen)

OLEH
TIM DOSEN PKN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN UMUM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2021



UNIVERSITAS
PENDIDIKAN
INDONESIA

A Leading and Outstanding University



Definisi Konstitusi

Konstitusi merupakan seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan.

Arti Sempit

Konstitusi merupakan suatu dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk penyelenggaraan negara.

Arti Luas

Konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan





Sifat Konstitusi

FLEKSIBEL

Konstitusi fleksibel, konstitusi yang dapat diubah melalui proses yang sama dengan undang-undang

RIGID

Konstitusi rigid, adalah konstitusi yang perubahannya dilakukan melalui cara-cara atau proses khusus

Fungsi Konstitusi

Landasan Penyelenggaraan Negara.

Membatasi Kekuasaan Pemerintah.

Menjamin Hak Asasi Warga Negara



UNIVERSITAS
PENDIDIKAN
INDONESIA
A Leading and Outstanding University

Perlunya Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa-Bernegara



UNIVERSITAS
PENDIDIKAN
INDONESIA
A Leading and Outstanding University



Sumber Historis, Sosiologis dan Politik Konstitusi.



HISTORIS

Perjuangan dan penegakan hak-hak dasar manusia berujung pada penyusunan konstitusi negara.

SOSIOLOGIS

Konstitusi menjamin hak-hak dasar warga negara

POLITIK

Undang-undang dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik

Hal yang Dimuat Dalam Konstitusi



UNIVERSITAS
PENDIDIKAN
INDONESIA
A Leading and Outstanding University



Organisasi Negara

Hak Asasi Manusia

Prosedur Mengubah UUD

Cita-cita Rakyat dan Ideologi Negara

Larangan Mengubah Sifat Tertentu dari UUD

Materi Konstitusi

- Jaminan HAM
- Susunan
Ketatanegaraan
- Pembagian Tugas
Ketatanegaraan
(J.G Steenbeek)

Diktum Konstitusi

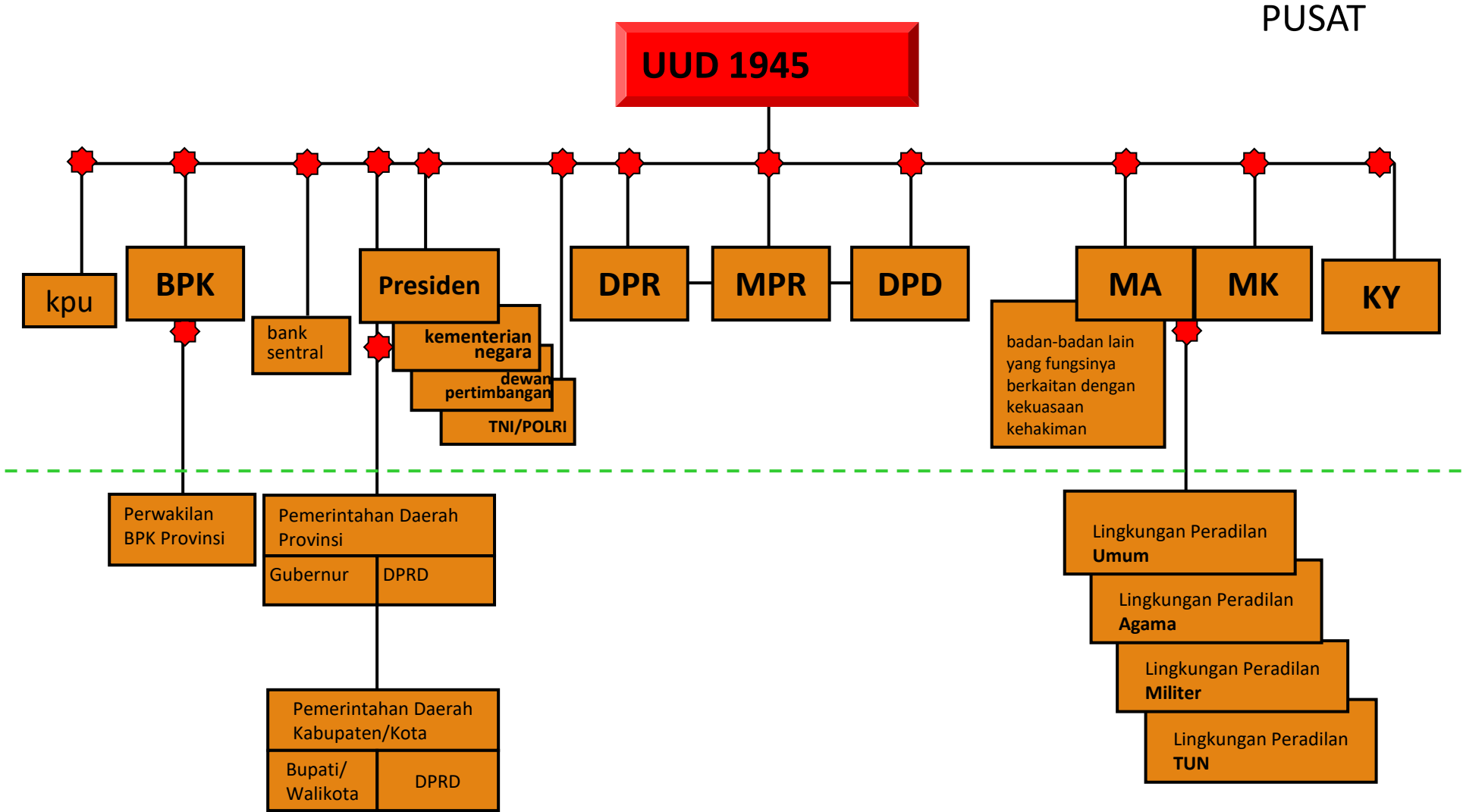
- Identitas Negara
- Daerah
- Bangsa
- Bahasa
- Bendera
- Lagu Kebangsaan
- Lambang Negara

Mengubah Konstitusi

- Sidang Legislatif
- Referendum
- Melalui Negara
Bagian
- Musyawarah
khusus/special
convention



**LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945**



DAERAH



ATRIBUT KENEGARAAN



- **Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih (Pasal 35)**
- **Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia (Pasal 36)**
- **Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Pasal 36A) ****
- **Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya (Pasal 36B) ****

DINAMIKA DAN TANTANGAN KONSTITUSI NEGARA RI



UNIVERSITAS
PENDIDIKAN
INDONESIA

A Leading and Outstanding University



UNDANG-UNDANG DASAR NRI 1945

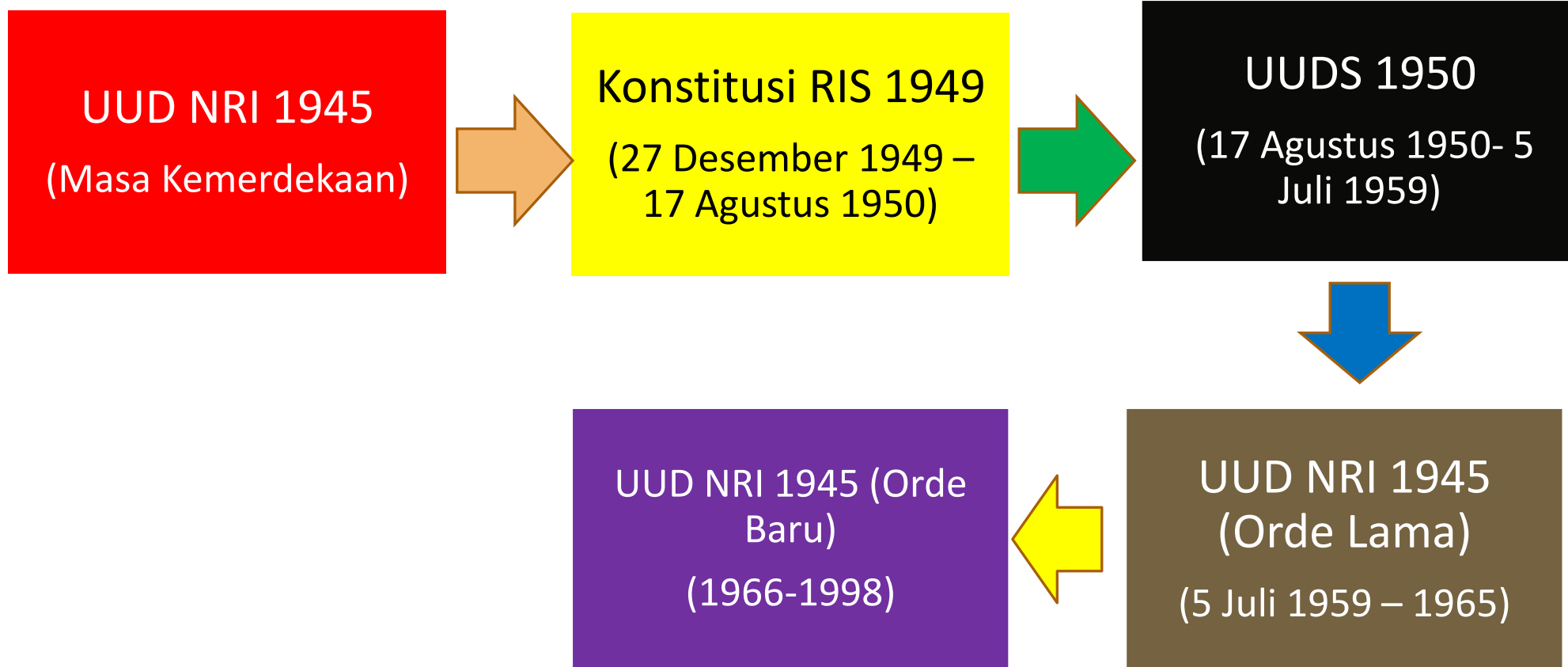


Setelah ditetapkan satu hari setelah kemerdekaan, UUD NRI 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya.

Sejak semula UUD NRI 1945 oleh Bung Karno dikatakan sebagai UUD kilat yang akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang.



Dinamika Konstitusi



Tuntutan Reformasi

Tuntutan Reformasi disampaikan oleh berbagai komponen bangsa terutama mahasiswa dan pemuda



1. Mengamandemen UUD NRI 1945
2. Menghapus doktrin Dwi Fungsi ABRI
3. Menegakkan supremasi hukum, penghormatan HAM, dan pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme)
4. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah
5. Mewujudkan kebebasan pers
6. Mewujudkan kehidupan demokrasi





Proses Perubahan UUD NRI 1945

Sebelum Perubahan

- Pembukaan
- Batang Tubuh : 16 Bab, 37 Pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan Peralihan, 2 ayat aturan tambahan
- Penjelasan

Latar Belakang Perubahan

- Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden
- Pasal multitafsir
- Kewenangan Presiden dalam mengatur hal penting dalam UU
- Semangat penyelenggaraan negara belum didukung oleh ketentuan konstitusi

Tujuan perubahan, menyempurnakan aturan :

- Tata negara
- Kedaulatan negara
- HAM
- Pembagian kekuasaan
- Kesejahteraan sosial
- Eksistensi negara demokrasi dan negara hukum
- Hal lain sesuai perkembangan aspirasi dan keutuhan negara

Proses Perubahan UUD NRI 1945 (Lanjutan)



Dasar Yuridis

- Pembukaan
- Pasal-pasal:
 - 21 bab
 - 73 Pasal
 - 170 Ayat
 - 3 Pasal aturan Perlihan
 - 2 Pasal aturan Tambahan

Kesepakatan Dasar :

- Tidak mengubah Pembukaan
- Tetap mempertahankan NKRI
- Mempertegas sistem presidensiil
- Penjelasan UUD NRI dimasuka kedalam pasal-pasal
- Perubahan dilakukan secara adendum

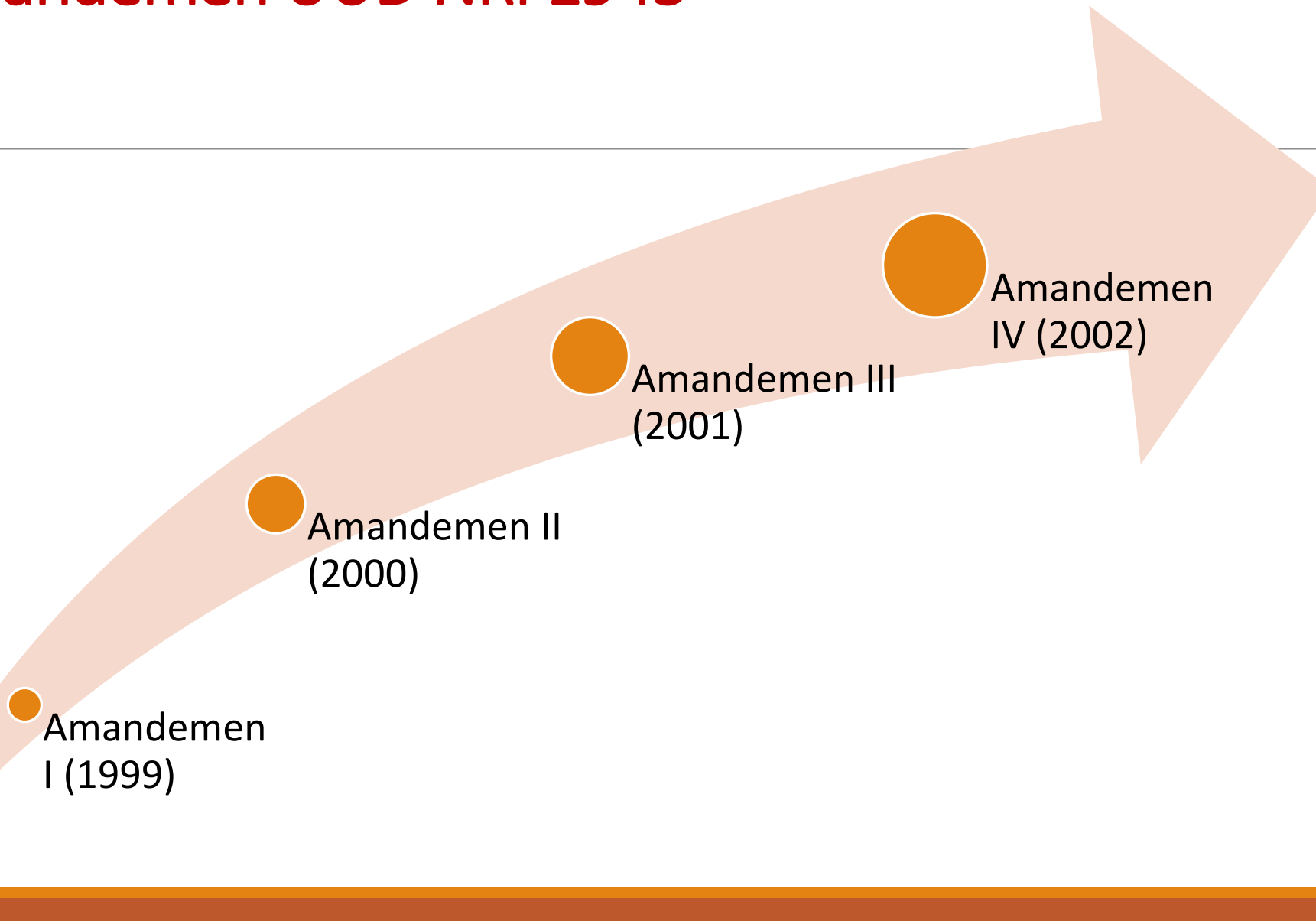
Sidang MPR

- Sidang Umum MPR 1999 tanggal 14-21 Okt 1999
- Sidang Tahunan MPR 2000 tanggal 7-18 Agustus 2000
- Sidang Tahunan MPR 2001 Tanggal 1-9 November 2001
- Sidang Tahunan MPR 2002 tanggal 1-11 Agustus 2002

Hasil perubahan:

- Pembukaan
- Pasal- pasal : 21 Bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan

Amandemen UUD NRI 1945





Tata Urutan Perundang-undangan



UUD NRI 1945 sebagai Konstitusi negara Indonesia memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara



Silahkan anda Analisis
Dinamika dan
Tantanga apa yang
dapat menghambat
pelaksanaan Konstitusi
di negara Indonesia ??





UNIVERSITAS
PENDIDIKAN
INDONESIA
A Leading and Outstanding University

Thank
you

